



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN  
NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

JL. BINTARO UTAMA SEKTOR V BINTARO JAYA, TANGERANG SELATAN 15223,  
TELEPON (021) 7361660, FAKSIMILI (021) 7361660, SITUS www.bppk.depkeu.go.id/webpkn

BERITA ACARA  
NOMOR BA- 16 /PP.6/2018  
REVIU DESAIN PEMBELAJARAN PELATIHAN

Pada hari ini Jumat tanggal Empat Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas di Pusdiklat KNPK telah dilakukan reviu desain pembelajaran Pelatihan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan jmlat pada mata diklat berikut:
  - a. Mata Diklat Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi 3 jmlat
2. Menghapus ceramah pimpinan.
3. Menambahkan kompetensi dasar pada standar kompetensi ke empat, sebagai berikut:
  - a. Memahami Kebijakan Dana Insentif Daerah

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Suyono	19730202 199203 1 001	WidyaSwara Madya	
2.	Beta Andri Anggiano Uliansyah	19791206 200112 1 001	WidyaSwara Muda	

Kasubbid Kurikulum

Trisni Syamsu Indyaputri  
NIP 19850215 200901 2 005

Kepala Bidang Perencanaan  
dan Pengembangan Diklat

Niken Widhijawati  
NIP 19710210 119803 2 001

Mengetahui  
Kapsudiklat Kekayaan Negara  
dan Perimbangan Keuangan

  
Syamsu Syakbani  
NIP 19590224 198003 1 001

## KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM	
Pelatihan Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah	
DESKRIPSI PROGRAM	TUJUAN PROGRAM
	Mampu memahami pengetahuan teknis dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	Memenuhi Kebutuhan Organisasi Sesuai Hasil AKP Strategis
	SASARAN (TARGET LEARNERS)
	ASN di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
MODEL PEMBELAJARAN	
<input checked="" type="checkbox"/>	TATAP MUKA (TM)
<input type="checkbox"/>	NON TATAP MUKA (NTM)
<input type="checkbox"/>	e-Learning
<input type="checkbox"/>	Bimbingan di tempat Kerja
<input type="checkbox"/>	PelatihanJarakJauh
<input type="checkbox"/>	Magang
<input type="checkbox"/>	Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta
<input type="checkbox"/>	.....
STANDAR KOMPETENSI	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami konsep Filosofi Otonomi Daerah dan Sentralisasi Fiskal</li> <li>2. Memahami isi Pokok-Pokok Keuangan Negara dan Keuangan Daerah</li> <li>3. Memahami kaidah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>4. Memahami prinsip Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa</li> <li>5. Memahami prosedur Mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa</li> <li>6. Memahami prinsip Pembiayaan dan Kapasitas Daerah</li> <li>7. Memahami prinsip Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan</li> <li>8. Memahami kaidah penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah</li> </ol>	

9. Memahami kaitan antara Tinjauan dampak Kebijakan Desentralisasi bagi Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
10. Memahami konsep Filosofi Otonomi Daerah dan Sentralisasi Fiskal
11. Memahami isi pokok visi, misi, organisasi, tupoksi dan kode Etik
12. Memahami arti penting perilaku yang berintegritas

#### KOMPETENSI DASAR

1. Memahami konsep Filosofi Otonomi Daerah dan Sentralisasi Fiskal
  - 1.1. Memahami filosofi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal
  - 1.2. Memahami hubungan antara otonomi daerah dengan desentralisasi fiskal
2. Memahami isi Pokok-Pokok Keuangan Negara dan Keuangan Daerah
  - 2.1. Memahami pengertian keuangan negara dan keuangan daerah
  - 2.2. Memahami mekanisme pengelolaan keuangan daerah
  - 2.3. Memahami arah kebijakan umum APBD
  - 2.4. Memahami pertanggungjawaban APBD
3. Memahami kaidah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - 3.1. Memahami pengertian, jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah
  - 3.2. Memahami persyaratan pajak daerah dan retribusi daerah
  - 3.3. Memahami prosedur penetapan pajak daerah dan retribusi daerah
  - 3.4. Memahami pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah
  - 3.5. Memahami kesalahan-kesalahan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
  - 3.6. Memperkirakan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - 3.7. Memahami pembangunan kapasitas
  - 3.8. Memahami pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah
4. Memahami prinsip Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa
  - 4.1. Memahami jenis-jenis dana bagi hasil
  - 4.2. Memahami penetapan dan formula dana alokasi umum
  - 4.3. Memahami kebijakan dana alokasi khusus
  - 4.4. Memahami kebijakan otonomi khusus
  - 4.5. Memahami kebijakan dana desa
  - 4.6. Memahami kebijakan dana insentif daerah
5. Memahami prosedur Mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa
  - 5.1. Memahami perbedaan antara transfer dengan belanja

- 5.2. Memahami dokumen transfer
- 5.3. Memahami mekanisme transfer DBH SDA
- 5.4. Memahami mekanisme transfer DAU
- 5.5. Memahami mekanisme transfer DAK
- 5.6. Memahami mekanisme transfer Dana Desa
- 6. Memahami prinsip Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
  - 6.1 Memahami mekanisme pinjaman daerah
  - 6.2 Memahami mekanisme hibah daerah
- 7. Memahami prinsip Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
  - 7.1 Memahami pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan
- 8. Memahami kaidah penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah
  - 8.1 Memahami tujuan sistem informasi keuangan daerah
  - 8.2 Memahami berbagai jenis laporan sistem informasi keuangan daerah
  - 8.3 Memahami penyampaian berbagai informasi dan sanksi
- 9. Memahami kaitan antara Tinjauan dampak Kebijakan Desentralisasi bagi Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
  - 9.1. Memahami kerangka teori dampak kebijakan desentralisasi fiskal
  - 9.2. Memahami indikator kemampuan keuangan dan ekonomi daerah
  - 9.3. Memahami dampak kebijakan fiskal terhadap keuangan dan ekonomi daerah
- 10. Memahami konsep Filosofi Otonomi Daerah dan Sentralisasi Fiskal
  - 10.1. Memahami ruang lingkup keuangan daerah
  - 10.2. Memahami akuntansi keuangan daerah
  - 10.3. Memahami analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah
- 11. Memahami isi pokok visi, misi, organisasi, tupoksi dan kode Etik
  - 11.1. Memahami struktur organisasi dan visi misi DJPK
  - 11.2. Memahami kedudukan, tugas, dan fungsi DJPK
  - 11.3. Memahami kode etik pegawai DJPK
- 12. Memahami arti penting perilaku yang berintegritas
  - 12.1. Memahami definisi dan pentingnya integritas
  - 12.2. Memahami pengertian kompetensi integritas dan nilai integritas di Kemenkeu
  - 12.3. Memahami cara mengembangkan perilaku berintegritas

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN						
No.	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen /Urutan
			TM	NTM	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	1. Filosofi Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal	4	-	4	-
		2. Pokok-Pokok Keuangan Negara dan Keuangan Daerah	4	-	4	-
		3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	8	-	8	-
		4. Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa	8	-	8	-
		5. Mekanisme Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa	4	-	4	-
		6. Pembiayaan dan Kapasitas Daerah	4	-	4	-
		7. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	3	-	3	-
		8. Sistem Informasi Keuangan Daerah	4	-	4	-
		9. Tinjauan Dampak Kebijakan Desentralisasi bagi Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	4	-	4	-
		10. Evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4	-	4	-
		11. Visi, Misi, Organisasi, Tupoksi, dan Kode Etik Pegawai DJPK	4	-	4	-
2	Mata Pelajaran Penunjang	1. Integritas	2	-	2	-
3	Ceramah	1. <i>Current Issue</i>	2	-	2	-
		2. Pengembangan SDM	2	-	2	-
4	PKL	-	-	-	-	-
5	Outbound	-	-	-	-	-
6	MFD	-	-	-	-	-
7	Pengarahan Program	-	-	-	-	-

8	Action Learning	-	-	-	-	-
TOTAL JP			57			
LAMA WAKTU UJIAN			660 menit			
DILAKUKAN DALAM			8 hari			

JENIS DAN JENJANG PROGRAM	
Diklat Teknis/Jenjang Dasar	
PERSYARATAN PESERTA	
1. CPNS di Lingkungan DJPK atau Instansi lain di Lingkungan Kementerian Keuangan yang ditugaskan/ditunjuk; 2. Pangkat/Golongan (Minimum): II/a; 3. Pendidikan Formal (Minimum): SMA;	
KUALIFIKASI PENGAJAR	
<b>1. Kualifikasi Umum</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan minimal S-1</li> <li>b. Mempunyai pengalaman mengajar;</li> <li>c. Mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan atau Pimpinan Instansi yang bersangkutan</li> </ul> <b>2. Kualifikasi Khusus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam mata diklat yang akan diberikan;</li> <li>b. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti TOT</li> </ul>	
BENTUK EVALUASI	
<b>EVALUASI LEVEL 1</b> Evaluasi Penyelenggaraan dan Pengajar , Tertulis, Evaluasi Tatap Muka	
<b>EVALUASI LEVEL 2</b> Ujian tertulis untuk setiap mata diklat pokok (Masing-masing 60 menit)	

**EVALUASI LEVEL 3**

Jika diperlukan

**EVALUASI LEVEL 4**

Jika diperlukan

**FASILITAS**

1. Asrama
2. Konsumsi
3. Laundry
4. Ruang kelas disesuaikan dengan metodologi pembelajaran dan jumlah peserta pelatihan dapat berbentuk *classroom*, *round table*, atau *U shape*
5. ATK peserta pelatihan

Tangerang Selatan, 4 Mei 2018  
Kepala Pusdiklat,



Syamsu Syakbani  
NIP 19590224 198003 1 001

<b>Keterangan:</b>	
Update Terakhir	: 4 Mei 2018
<b>Keterangan :</b>	
Update Terakhir	: 24 Januari 2017
Tempat	: Pusdiklat KNPK, Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan
Berdasarkan masukan pada rapat persiapan diklat TA 2017	